

DOMESTIC RESOURCES POLICIES :
DUKUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
DALAM PEMBENTUKAN MODAL

Oleh :

Dhani Kurniawan*)

Abstraksi

Peranan kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian menjadi perdebatan yang menghangat kembali, khususnya sejak krisis ekonomi melanda Negara-negara Asia dan yang terkini adalah melemahnya perekonomian Amerika Serikat. Di Negara-negara Asia yang dilanda krisis, peranan kebijakan fiskal telah meningkat dalam mendukung pemulihan ekonomi, namun efektivitas stimulus fiskal untuk menggantikan pengeluaran swasta tetap dipertanyakan. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut peranan, prasyarat, efektivitas dan pilihan jenis kebijakannya serta hubungannya dengan kebijakan makro yang lain.

Pada dasarnya kebijakan fiskal dimaksud untuk memberikan lebih banyak kelonggaran dana untuk mendorong perekonomian. Namun kebijakan fiskal seringkali menjadi kurang efektif kalau tidak didukung oleh situasi/ kondisi yang tepat dan kebijakan lain yang konsisten, bahkan tidak mustahil kebijakan fiskal justru dapat menghambat laju perekonomian misalnya stimulus fiskal yang semestinya akan meningkatkan *aggregate demand*, namun apabila tidak diimbangi kebijakan moneter yang akomodatif justru dapat menyebabkan *outcomes* yang kontra produktif.

Keywords :kebijakan fiskal, kebijakan moneter

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sangat berbeda coraknya dengan yang dihadapi oleh negara-negara maju. Negara berkembang pada umumnya memiliki taraf pembangunan dan kemakmuran yang masih relatif rendah, yang terutama ditandai dengan adanya masalah pengangguran yang bertambah serius sebagai akibat dari bertambah cepatnya perkembangan penduduk. Oleh karena itu, timbullah keperluan yang mendesak untuk mempercepat pembangunan di negara-negara berkembang agar pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan, masalah penduduk diatasi, dan masalah pengangguran tidak menjadi bertambah serius. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut maka diperlukan campur tangan pemerintah, baik melalui kebijakan ekonomi maupun kebijakan nonekonomi.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pembentukan Modal (Capital Formation Policy)

Para ahli ekonomi menekankan arti penting pembentukan modal (*Capital Formation*) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli ekonomi mendefinisikan istilah pembentukan modal secara berbeda, sebagai berikut:

- a. Menurut *Prof. Nurkse*; pembentukan modal berarti masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal; perkakas dan alat-alat, mesin dan fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya serta segala mac
- b. Dalam bentuk modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Proses pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Definisi *Prof. Nurkse* tersebut hanya menyangkut pemupukan modal material dan mengabaikan modal manusia.
- c. Menurut *Dr. Singer*; pembentukan modal terdiri dari barang yang nampak seperti pabrik, alat-alat dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan yang bermutu tinggi, kesehatan, tradisi ilmiah dan penelitian. Definisi *Dr. Singer* menyangkut pemupukan modal material dan modal manusia.

d. Menurut *Simon Kuznet*; pembentukan modal domestik tidak hanya menyangkut biaya untuk konstruksi, peralatan dan persediaan dalam negeri, tetapi juga peralatan lain kecuali pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan output pada tingkat yang ada. Pembentukan modal juga mencakup pembiayaan untuk pendidikan, rekreasi dan barang mewah yang memberikan kesejahteraan dan produktifitas lebih pada individu dan semua pengeluaran masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan moral penduduk yang bekerja. Sebagaimana Dr. Singer, *Simon Kuznet* menyatakan bahwa istilah pembentukan modal meliputi modal material dan modal manusia.

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Menurut *Nurkse*, lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal, sebagai akibat dari rendahnya pendapatan di negara berkembang maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal dan dapat diatasi dengan pembentukan modal. Lewat itu persediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan meningkat, skala produksi meluas sehingga overhead ekonomi dan sosial tercipta. Pembentukan modal membawa pada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada sehingga dapat menaikkan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, menekan angka inflasi dan defisit neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktifitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebuna, industri dan bidang lainnya. modal juga diperlukan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya dsan kereta api, dan juga infrastrukur lain. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. Hal ini hanya mungkin jika laju pembentukan modal didalam negeri cukup cepat, yaitu jika bagian dari pendapatan atau output yang ada di masyarakat hanya sedikit saja yang dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung dan diinvestasikan dalam peralatan modal.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Lewis, masalah pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan tabungan dan investasi nasional. Investasi dalam peralatan modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja, pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Pembentukan modal memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat. Intinya pembentukan modal memberikan pengaruh yang positif bagi kesempatan kerja.

Pembentukan modal menciptakan perluasan pasar.

Dialah yang membantu menyingkirkan ketidaksempurnaan pasar melalui penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi -memotong lingkaran setan kemiskinan baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan-. Lebih jauh pembentukan modal membuat pembangunan menjadi mungkin

kendati jumlah penduduk terus meningkat dengan pesat. Di negara berkembang yang berpenduduk tinggi seperti di Indonesia mempunyai keterkaitan antara kenaikan output perkapita dengan rasio modal-tenga kerja. Tetapi di negara2 yang bermaksud meningkatkan rasio modal-buruh terpaksa menghadapi dua masalah; *pertama*, rasio modal-buruh jatuh akibat naiknya penduduk sehingga diperlukan investasi netto yang besar untuk mengatasi kemerosotan rasio tersebut. *Kedua*, pada waktu penduduk meningkat dengan pesat, menjadi sulit untuk mendapatkan tabungan yang cukup untuk memperoleh sejumlah tingkat investasi yang diperlukan karena disebabkan rendahnya pendapatan perkapita yang membuat kecenderungan marginal menabung tetap rendah sehingga satu2 jalan ialah dengan mempertinggi laju pembentukan modal.

Pembentukan modal mengatasi masalah neraca pembayaran. Negara berkembang juga dihadapkan pada masalah neraca pembayaran, sebab kebanyakan negara tersebut mengekspor barang primer (seperti bahan mentah dan hasil pertanian) dan mengimpor hampir semua barang manufaktur dan barang modal. Pembentukan modal domestik merupakan salah satu pemecahan pokok kesulitan neraca pembayaran ini. Dengan mendirikan industri pengganti impor, impor atas barang2 tersebut dapat dikurangi, pada pihak lain dengan meningkatnya produksi segala macam barang konsumsi dan barang modal maka komposisi ekspor menjadi berubah. Bersama2 dengan hasil pertanian dan bahan mentah industri, ekspor barang manufaktur juga bermula. Jadi pembentukan modal membanut memecahkan masalah neraca pembayaran.

Pembentukan modal dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Laju pembentukan modal yang cepat, lambat laun dapat mengurangi kebutuhan akan modal asing karena pembentukan modal pada kenyataannya membantu tercapainya swasembada suatu negara dan mengurangi beban utang luar negeri. Jika suatu negara meminjam dari negara lain untuk jangka panjang, utang tersebut merupakan beban yang berat bagi generasi mendatang. Pada setiap peminjaman, beban utang dari hari ke hari semakin membesar dan hanya bisa dibayar kembali dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Beban pajak meningkat dan uang mengalir keluar dalam bentuk pembayaran utang. Dan hanya dengan pembentukan modal suatu negara dapat terlepas dari masalah utang luar negeri.

2. Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan transfer pemerintah (*government transfer*). Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya. Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional.

Pada sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional) maka pendapatan nasional (Y)

dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan :

$$Y = C + I + G,$$

dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :

$$C = aY + b$$

Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan diformulasikan sebagai :

$$YD = Y - T_x + T_r$$

$$YD = C + S$$

Dimana :

T_x : Pajak

T_r : Transfer pemerintah

S : Saving

Dimana saving dapat difungsikan sebagai :

$$S = (1-a)Y - b$$

3. Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Kebijakan moneter adalah sebagai politik atau kebijaksanaan pemerintah (melalui Bank Sentral) untuk mengawasi jumlah uang beredar (*supply of money*) dalam mendorong, memelihara dan menciptakan serta mempertahankan :

1. tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi
2. perluasan kesempatan kerja, dan
3. tingkat harga-harga yang stabil

Dalam kajian literature dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter

yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan moneter tersebut tergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi. Dari sejumlah literatur, temuan utama yang menarik mengenai hubungan antara uang beredar, inflasi, dan output adalah bahwa dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi adalah sempurna, sementara hubungan antara pertumbuhan uang atau inflasi dengan pertumbuhan output riil mungkin mendekati nol. Temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya akan berdampak pada inflasi, dan tidak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi riil.

Instrumen-instrumen kebijakan moneter meliputi :

1. Politik diskonto dan tingkat suku bunga
2. Politik pasar terbuka (*open market operation*)
3. Politik cadangan minimum (*reserve requirement policy*)
4. Pengawasan pinjaman secara selektif (*selective credit control*)
5. Pembujukan moral atau *moral suasin*.

Kebijakan pada nomor 1, 2, dan 3 termasuk kebijakan "*quantitative credit control*", sedangkan kebijakan pada point 4 dan 5 termasuk kebijakan "*qualitative kredit control*" (Syamsuddin Jafar Drs. Ek, 1993;1).

Secara spesifik, Taylor (1995) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah "*the*

process through which monetary policy decisions are transmitted into changes in real GDP and inflation". Dalam literatur ekonomi moneter, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*). Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai *The Equation of Exchange*:

$$MV = PT$$

dimana jumlah uang beredar (M) dikalikan dengan tingkat perputaran uang/*income velocity* (V) sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi/output riil (T) dikalikan dengan tingkat harga (P). Dengan kata lain, dalam keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi (MV) sama dengan jumlah output yang, dihitung dengan harga yang berlaku, yang ditransaksikan (PT).

Berdasarkan mekanisme transmisi ini, dalam jangka pendek, pertumbuhan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi perkembangan output riil. Selanjutnya, dalam jangka menengah pertumbuhan jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga (inflasi), yang pada gilirannya menyebabkan penurunan perkembangan output riil menuju posisi semula. Dalam keseimbangan jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output riil, tetapi mendorong kenaikan laju inflasi secara proposional.

Jalur moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor selain uang terhadap inflasi, seperti suku bunga, nilai tukar, harga aset, kredit, dan ekspektasi. Dalam, perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung, mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui lima jalur lainnya, yaitu :

a. Jalur suku bunga (*interest rate channel*)

Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku Bunga jangka menengah/panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi *cost of capital* (biaya modal), yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran, investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan agregat.

b. Jalur nilai tukar (*exchange rate channel*)

Mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat, dan selanjutnya output dan harga. Besar kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar tergantung pada sistem nilai tukar yang dianut oleh suatu negara. Misalnya, dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang impor. Hal ini selanjutnya akan mendorong kenaikan harga barang domestik, walaupun

tidak terdapat ekspansi di sisi permintaan agregat. Sementara itu, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter pada perkembangan output riil dan inflasi menjadi semakin lemah (dengan time lag 'tenggat waktu' yang panjang), terutama apabila terdapat substitusi yang tidak sempurna antara aset domestik dan aset luar negeri.

c. Jalur harga aset (*assets price channel*)

Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga, dan pada gilirannya akan menekan harga aset perusahaan (market value). Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara keseluruhan, kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran agregat.

d. Jalur kredit (*credit channel*)

Mekanisme transmisi melalui jalur kredit dapat dibedakan menjadi dua jalur. Pertama, jalur pinjaman bank (*bank lending channel*) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Kedua, jalur neraca perusahaan (*balance sheet channel*) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan, dan

selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit.

e. Jalur ekspektasi (*expectation channel*)

Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan agregat dan inflasi.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai kebijakan moneter diperlukan pemahaman mengenai kerangka operasional kebijakan moneter. Pada umumnya kerangka kebijakan moneter terdiri dari instrumen, sasaran operasional, sasaran antara, serta sasaran akhir.

Instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Beberapa pilihan instrumen yang digunakan antara lain adalah operasi pasar terbuka (*open market operation*), cadangan wajib (*minimum reserve requirement*), fasilitas diskonto (*discount facility*), dan imbauan (*moral suasion*).

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran antara bank central memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sasaran operasional yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara

dapat dikendalikan otoritas moneter, dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara. Beberapa pilihan sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer (M0) dan suku bunga jangka pendek.

Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan, terdapat tenggat waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi kebijakan yang biasa disebut sasaran antara. Sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa pilihan sasaran antara yang dapat digunakan antara lain besaran moneter seperti M1, M2, atau kredit dan suku bunga.

4. KONDISI EKONOMIKA INDONESIA

Jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang

tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut kenaikannya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia tahun 1990-1996 sebelum krisis moneter adalah sebesar 7,25%, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2000-2008 setelah krisis moneter adalah sebesar 4,87%. Jika diperhatikan pertumbuhan ekonomi rata-rata setelah krisis moneter tahun 1997-1999 tidak lagi mencapai sebesar sebelum krisis moneter.

Sektor pengeluaran konsumsi swasta memegang peranan terbesar dalam pertumbuhan PDB yang porsinya mencapai 57,21% pada akhir tahun 2008, dengan pertumbuhan yang cenderung meningkat dengan rata-rata selama lima tahun mencapai 4,36%. Kontribusi pembentukan modal domestik tetap selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 22,37% dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung meningkat yaitu sebesar rata-rata 8,43%, kecuali pada tahun 2006 yang sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan belanja pemerintah menempati porsi terkecil hanya sebesar 8,13% pada akhir 2008 dengan pertumbuhan yang berfluktuasi, yang sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2007 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2008.

Dari berbagai survey membuktikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis atau investasi adalah tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Alasan utama investor khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan

ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi, perizinan usaha, dan regulasi pasar (World Bank;2004). Pelaksanaan otonomi daerah ditengarai juga menjadi memperburuk iklim Indonesia seperti masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, perda yang tidak pro bisnis, dsb. Dalam kondisi tersebut dibutuhkan suatu bauran kebijakan fiskal dan moneter agar dapat menjadi stimulus perekonomian Indonesia dimana kebijakan tersebut saling terintegrasi atau tidak parsial.

Disamping itu gebrakan yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan sejumlah paket kebijakan yaitu Inpres No.3/2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi, Inpres No.6/2007 tentang percepatan sektor Riil dan UMKM dan Inpres No.5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009.
2. Reformasi Perpajakan dengan melakukan perubahan UU Pajak, memperbaiki administrasi pajak dengan tujuan peningkatan jumlah pajak, perluasan pembayar pajak, peningkatan daya saing, dsb
3. Reformasi kepabeanan dn Bea Cukai dengan tujuan memperlancar arus barang dan jasa ke pasar global dengan menyederhanakan prosedur impor dan ekspor untuk mengurangi biaya usaha dan penyelundupan.
4. Manajemen Utang dan Anggaran Negara
5. Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan dengan memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kredibilitas sampai ke pemberian gaji hingga mencapai fair remuneration.

C. PENUTUP

Tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha yaitu:

1. Penyederhanaan sistem dan perijinan
2. Penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih
3. Transparansi biaya perijinan

Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah tidak hanya menghambat arus barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, sehingga perlu deregulasi dan sinkronisasi berbagai peraturan daerah dan pusat sebagai starting point.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pusat baik kebijakan fiskal ataupun moneter harus saling sinkron satu sama lain. Kebijakan tersebut harus saling mendukung dan tidak bersifat parsial sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

DAFTAR PUSTAKA

- Prof Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di tengah krisis Global*, Yogyakarta, 2009
- Dr Sri Mulyani Indrawati, *Dukungan Kebijakan Fiskal bagi Investasi*, makalah yang disampaikan dalam Investor Forum, Jakarta, 29 Mei 2007
- N. Gregory Mankiw (2006). *Principles of Economics*, 4th Edition. South-Western College Pub. ISBN 0324224729.
- Rudiger Dornbush, S. Ficher, *Macroeconomics*, McGraw-Hill, New York, 1990 5th ed.